SALINAN

GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH PEMERINTAH ACEH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh Pemerintah Aceh Tahun 2027;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

9. Peraturan .../2

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 6);
19. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
20. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 141);
21. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 151);

.22. Qanun .../3

22. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2025-2029 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 152);
23. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH PEMERINTAH ACEH TAHUN 2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
4. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disebut SKPA adalah Perangkat Pemerintah Aceh; dan
5. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut dengan Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Aceh untuk periode 1 (satu) Tahun yang memuat kebijakan, Program dan Kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Pasal 2

(1) Menetapkan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Pemerintah Aceh Tahun 2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2) Renja SKPA Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Aceh Pemerintah Aceh untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2027 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2027 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2027.

Pasal 3

Renja SKPA Pemerintah Aceh Tahun 2027 digunakan untuk:

a. Dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah; dan
b. Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPA Tahun 2026;

Pasal 4 .../4

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 30 Juli 2026
15 Shafar 1448

GUBERNUR ACEH,

Ttd.

MUZAKIR MANAF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 30 Juli 2026
15 Shafar 1448

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

Ttd.

M. NASIR

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2026 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. AMRIZAL J PRANG, SH, LL.M

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA
PERANGKAT ACEH PEMERINTAH ACEH TAHUN 2027.---

PENETAPAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH PEMERINTAH ACEH TAHUN 2027

No.	NOMOR	SKPA
1	2	3
1	01/Renja-Disdik/2026	Dinas Pendidikan Aceh
2	02/Renja-Dinkes/2026	Dinas Kesehatan Aceh
3	03/Renja-RSUZA/2026	BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin
4	04/Renja-RSJ/2026	BLUD Rumah Sakit Jiwa
5	05/Renja-RSIA/2026	BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak
6	06/Renja/PUPR/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh
7	07/Renja-Pengairan/2026	Dinas Pengairan Aceh
8	08/Renja-Perkim/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
9	09/Renja-Satpol.PP.WH/2026	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh
10	10/Renja-BPBA/2026	Badan Penanggulangan Bencana Aceh
11	11/Renja-Dinsos/2026	Dinas Sosial Aceh
12	12/Renja-Naker/2026	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
13	13/Renja-DP3A/2026	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
14	14/Renja-Pangan/2026	Dinas Pangan Aceh
15	15/Renja-Tanah/2026	Dinas Pertanahan Aceh
16	16/Renja-DRKA/2026	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh
17	17/Renja-DPMGA/2026	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh
18	18/Renja-Dishub/2026	Dinas Perhubungan Aceh
19	19/Renja-Kominsa/2026	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh
20	20/Renja-Kop.UKM/2026	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh
21	21/Renja-DPMPTSPA/2026	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh
22	22/Renja-Dispora/2026	Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh
23	23/Renja-Disbudpar/2026	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh
24	24/Renja-Arpus/2026	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh
25	25/Renja-DPDA/2026	Dinas Pendidikan Dayah Aceh
26	26/Renja-MPA/2026	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
27	27/Renja-KKW/2026	Keurukon Katibul Wali Aceh
28	28/Renja-MAA/2026	Sekretariat Majelis Adat Aceh
29	29/Renja-DSI/2026	Dinas Syariat Islam Aceh
30	30/Renja-MPU/2026	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
31	31/Renja-BMA/2026	Sekretariat Baitul Mal Aceh
32	32/Renja-BRA/2026	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh
33	33/Renja-DKP/2026	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
34	34/Renja-Tanbun/2026	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
35	35/Renja-Disnak/2026	Dinas Peternakan Aceh
36	36/Renja-DLHK/2026	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
37	37/Renja-ESDM/2026	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh
38	38/Renja-Indag/2026	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
39	39/Renja-Inspektorat/2026	Inspektorat Aceh
40	40/Renja-BAPPEDA/2026	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh
41	41/Renja-BPKA/2026	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
42	42/Renja-BKA/2026	Badan Kepegawaian Aceh
43	43/Renja-BPSDM/2026	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh
44	44/Renja-BPPA/2026	Badan Penghubung Pemerintah Aceh
45	45/Renja-Ro.Umum/2026	Biro Umum
46	46/Renja-Ro.Pemotda/2026	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
47	47/Renja-Ro.Ekonomi/2026	Biro Perekonomian
48	48/Renja-Ro.isra/2026	Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat
49	49/Renja-Ro.Organ/2026	Biro Organisasi
50	50/Renja-Ro.Hukum/2026	Biro Hukum
51	51/Renja-Ro. Adpem/2026	Biro Administrasi Pembangunan
52	52/Renja-Ro. Adpim/2026	Biro Administrasi Pimpinan
53	53/Renja-Ro.PBJ/2026	Biro Pengadaan Barang/Jasa
54	54/Renja-Sek.DPRA/2026	Sekretariat DPR Aceh
55	55/Renja-Kesbangpol/2026	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh

GUBERNUR ACEH,

Ttd.

MUZAKIR MANAF